

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Ghozali (2021), “teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan kondisi ketika dua pihak memiliki tingkat informasi yang berbeda, sehingga pihak yang memiliki informasi lebih banyak berusaha menyampaikan sinyal kepada pihak lain. Dalam konteks perusahaan, sinyal diberikan oleh manajemen untuk memengaruhi keputusan dan penilaian pihak penerima informasi. Teori sinyal banyak digunakan dalam penelitian akuntansi, auditing, dan manajemen keuangan karena menjelaskan bagaimana manajemen menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan melalui berbagai bentuk pengungkapan informasi keuangan yang dapat ditangkap sebagai sinyal oleh investor”.

Ghozali (2021) juga menyatakan bahwa, “sinyal merupakan bentuk isyarat yang diberikan perusahaan atau manajer kepada pihak eksternal, terutama investor. Sinyal tersebut dapat berupa informasi yang mudah diamati secara langsung maupun informasi yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahaminya. Terlepas dari bentuknya, seluruh sinyal yang disampaikan perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi tertentu kepada pihak luar dengan harapan dapat memengaruhi penilaian mereka terhadap perusahaan. Oleh karena itu, sinyal yang diberikan harus memiliki kandungan informasi yang memadai agar mampu mengubah persepsi dan penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan”.

Sulistyo & Budi (2023) menyatakan bahwa “*signaling theory* juga menggambarkan laporan keuangan berkualitas baik berperan sebagai sinyal atau tanda suatu perusahaan telah mengoperasikan proses kerjanya dengan baik. Untuk itu manajer memiliki kewajiban menyampaikan sinyal perihal seperti apa situasi perusahaan kepada pemilik yang menjadi bentuk tanggung jawab manajer terhadap pengelolaan perusahaan”. Menurut Angelina & Amanah (2021), “teori sinyal

(*signaling theory*) menjelaskan bahwa perusahaan melakukan tindakan tertentu untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan di masa depan. Sinyal tersebut dapat disampaikan melalui laporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja manajemen yang baik akan menghasilkan sinyal positif yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal. Informasi yang dipublikasikan perusahaan memiliki peran penting karena dapat memengaruhi keputusan investasi pihak eksternal. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan, baik pada masa lalu maupun prospek di masa mendatang, serta dampaknya terhadap keberlangsungan perusahaan”.

Selanjutnya Arfianti & Anggreini (2023) menyatakan bahwa, “sinyal merupakan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor mengenai pandangan mereka terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Manajemen yang meyakini bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik akan berupaya menyampaikan informasi tersebut kepada pemegang saham dan calon investor. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat mendorong peningkatan nilai dan harga saham perusahaan”.

Menurut Supandi & Goenawan (2021), “teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, khususnya investor dan pelaku pasar modal. Teori ini menekankan pentingnya informasi yang dipublikasikan perusahaan karena informasi tersebut menjadi dasar bagi pihak luar dalam menilai kondisi perusahaan dan mengambil keputusan investasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambaran mengenai kondisi perusahaan pada masa lalu, kondisi saat ini, maupun prospek perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, investor membutuhkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu agar dapat melakukan analisis pasar serta menentukan keputusan investasi yang tepat”.

Siburian & Nurlatifah (2021) menyatakan bahwa, “teori sinyal membahas bagaimana manajemen sebagai agen menyampaikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalannya kepada pemilik modal sebagai prinsipal. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi terkait kondisi perusahaan kepada publik. Informasi yang dipublikasikan tersebut akan menjadi sinyal bagi investor, baik berupa sinyal positif maupun sinyal negatif, tergantung pada kandungan informasi yang diterima. Peningkatan *Earnings Per Share (EPS)* dapat diartikan sebagai sinyal positif karena mencerminkan kondisi perusahaan yang baik, peningkatan kinerja, serta meningkatnya profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, penurunan *EPS* akan dipandang sebagai sinyal negatif yang menunjukkan adanya penurunan kinerja perusahaan sehingga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek perusahaan”.

Menurut Qotimah & Kalangi (2023), “hubungan antara *Earnings Per Share (EPS)* dan teori sinyal (*signaling theory*) terletak pada peran *EPS* sebagai indikator yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan kepada investor. Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menyampaikan informasi yang dapat dipercaya kepada investor terkait kondisi serta prospek perusahaan di masa depan. Dalam hal ini, tingkat *EPS* yang tinggi atau mengalami peningkatan dapat menjadi sinyal positif yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Informasi tersebut dapat meningkatkan keyakinan investor bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memberikan dividen serta memiliki prospek pertumbuhan nilai saham di masa mendatang. Oleh karena itu, *EPS* yang meningkat dapat memengaruhi persepsi investor secara positif dan mendorong minat mereka untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut”.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), “laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang tersusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan ekonomi”. Selanjutnya, Weygandt et al. (2022), menyatakan bahwa “laporan keuangan berfungsi sebagai sarana yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Informasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kondisi dan kinerja perusahaan”. Sejalan dengan hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (2022) menjelaskan bahwa, “tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi”.

Menurut Weygandt et al. (2022) “terdapat tiga aktivitas yang dilakukan pada proses akuntansi, yaitu:”

1. “Identifikasi”
“Perusahaan memilih peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnis milik perusahaan tersebut”.
2. “Pencatatan”
“Setelah diidentifikasi, perusahaan akan melakukan pencatatan ke dalam riwayat dari aktivitas keuangan perusahaan secara sistematis dan kronologis dalam bentuk mata uang”.
3. “Komunikasi”
“Setelah informasi-informasi keuangan dikumpulkan, maka perusahaan akan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada penggunanya (*accounting reports*) melalui laporan keuangan perusahaan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2024) dalam PSAK 201, “laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:”

- (a). “Aset”
- (b). “Liabilitas”
- (c). “Ekuitas”
- (d). “Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian”
- (e). “Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan”
- (f). “Arus kas”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), “laporan keuangan yang lengkap terdiri dari”.

- a. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”.
- b. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”.
- c. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”.
- d. “Laporan arus kas selama periode”.
- e. “Catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan”.
- f. “Entitas wajib menyajikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya atas seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali apabila Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengatur atau memperbolehkan perlakuan yang berbeda. Selain informasi angka, informasi yang bersifat naratif dan deskriptif dari periode sebelumnya juga perlu diungkapkan apabila relevan untuk memahami laporan keuangan periode berjalan. Dalam penyajiannya, entitas sekurang-kurangnya menyampaikan dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas,

dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang terkait”.

- g. “Entitas juga harus menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif terdekat apabila menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, melakukan penyajian kembali terhadap pos-pos dalam laporan keuangan, atau melakukan reklasifikasi pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam paragraf 40A–40D”.

Menurut Weygandt et al. (2022), “laporan keuangan terdiri atas beberapa jenis, yaitu:”

- a. “Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode”.

“Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai jumlah dan karakteristik sumber daya yang dimiliki perusahaan, kewajiban kepada kreditur, serta hak kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan”.

- b. “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode”.

“Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain digunakan untuk menunjukkan hasil kinerja operasional perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usahanya”.

- c. “Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode”

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Perubahan tersebut mencerminkan penambahan atau pengurangan hak pemilik yang terjadi dalam periode yang sama dengan laporan laba rugi”.

- d. “Laporan Arus Kas Selama Periode”.

“Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama suatu periode. Laporan ini menjelaskan penggunaan dan sumber kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta menunjukkan perubahan saldo kas dari awal hingga akhir periode”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), “kegunaan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan meningkat apabila informasi tersebut memiliki sifat dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan mudah dipahami. Karakteristik tersebut berperan sebagai karakteristik kualitatif peningkat yang mendukung kualitas informasi sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna. Selain itu, karakteristik kualitatif peningkat dapat memperkuat informasi yang relevan dan mampu merepresentasikan kondisi yang sebenarnya secara tepat. Karakteristik ini juga membantu dalam menentukan metode penyajian yang paling sesuai ketika terdapat lebih dari satu cara untuk menggambarkan suatu fenomena, sepanjang masing-masing cara tersebut memberikan informasi yang sama relevan dan mampu merepresentasikan fenomena tersebut secara akurat”.

“Laporan laba rugi merupakan laporan yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja operasional perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai jumlah, waktu, serta tingkat ketidakpastian arus kas yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Informasi tersebut bermanfaat bagi investor dan kreditor dalam mengevaluasi kondisi perusahaan serta sebagai dasar untuk memperkirakan arus kas masa depan. Oleh karena itu, laporan laba rugi dapat digunakan oleh investor dan kreditor sebagai alat dalam memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas pada periode yang akan datang melalui berbagai pendekatan analisis” (Kieso et al. 2024).

1. “Mengevaluasi kinerja perusahaan pada periode sebelumnya”.

“Informasi mengenai pendapatan dan beban dapat digunakan untuk menilai hasil kinerja perusahaan pada masa lalu. Selain itu, informasi tersebut memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja

perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan para pesaingnya”.

2. “Menjadi dasar dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang”
“Data kinerja perusahaan pada periode sebelumnya dapat membantu mengidentifikasi berbagai tren yang terjadi. Tren tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan kondisi dan kinerja perusahaan pada periode yang akan datang”.
3. “Membantu menilai risiko dan ketidakpastian terkait arus kas masa depan
Informasi mengenai unsur-unsur dalam laporan laba rugi, seperti pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antar komponen tersebut. Informasi ini juga membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai tingkat risiko dan kemungkinan perusahaan tidak dapat mencapai arus kas yang diharapkan pada masa mendatang. Hal ini juga membantu menilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan”.

Dalam Weygandt et al. (2022) “informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna bergantung pada jenis keputusan yang mereka ambil. Secara umum, terdapat dua kelompok utama pengguna informasi keuangan, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal.”

1. “Pengguna Internal (*internal User*)”.

“Pengguna internal informasi akuntansi adalah pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengguna internal tersebut meliputi manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, serta pimpinan perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan bisnis, mereka memanfaatkan informasi akuntansi untuk menjawab berbagai pertanyaan penting yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja perusahaan”.

2. “Pengguna Eksternal (*External User*)”.

“Pengguna eksternal merupakan individu maupun organisasi yang berada di luar perusahaan dan membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk berbagai tujuan pengambilan keputusan. Dua kelompok pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor”.

- a. “Investor menggunakan informasi akuntansi untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi, seperti menentukan apakah akan membeli, mempertahankan, atau menjual saham suatu perusahaan”.
- b. “Kreditor, termasuk pemasok dan lembaga perbankan, memanfaatkan informasi akuntansi untuk menilai tingkat risiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit atau pinjaman kepada perusahaan”.

2.3 Earnings Per Share (EPS)

Menurut Weygandt et al. (2022) “rasio profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengukur keberhasilan kinerja operasional selama suatu periode tertentu. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan memiliki pengaruh terhadap kemampuannya dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang berasal dari utang maupun modal sendiri. Selain itu, laba juga berhubungan dengan kondisi likuiditas perusahaan serta kemampuannya untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, kreditor dan investor memberikan perhatian besar terhadap tingkat profitabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bagi analis, profitabilitas juga sering dijadikan indikator utama untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam mengelola operasional perusahaan”. Rasio profitabilitas terdiri dari (Weygandt et al. 2022)

1. “Profit margin”

“*Profit margin ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba yang dihasilkan dari setiap penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba bersih terhadap penjualan bersih”.

2. “*Asset turnover*”

“*Asset turnover* digunakan untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penjualan bersih dengan rata-rata total aset”.

3. “*Return on asset*”

“*Return on Assets (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset”.

4. “*Return on ordinary shareholders' equity*”

“*Return on Ordinary Shareholders' Equity (ROE)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham biasa atas investasi yang mereka tanamkan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dan dihitung dengan membandingkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa”.

5. “*Earnings per share*”

“*Earnings per Share (EPS)* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Perhitungan *EPS* dilakukan dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode berjalan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham”.

6. “Price earning ratio”

“Price Earning Ratio (*PER*) adalah rasio yang mengukur hubungan antara harga pasar saham dengan laba per saham perusahaan. Rasio ini mencerminkan harapan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa mendatang. *PER* dihitung dengan membandingkan harga pasar per saham dengan laba per saham”.

7. “Payout ratio”

“Payout ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan”.

Menurut Weygandt et al. (2022), “*Earning per Share (EPS)* merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh pada setiap lembar saham biasa. *EPS* dihitung dengan membandingkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama satu periode. Informasi mengenai laba per saham memiliki peranan penting dalam menilai tingkat profitabilitas perusahaan karena memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham”. Menurut Andriani et al. (2022) menjelaskan bahwa, “*EPS* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh dari setiap lembar saham yang beredar. Nilai *EPS* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar kepada pemegang saham, sedangkan nilai *EPS* yang rendah mencerminkan tingkat keuntungan yang lebih rendah bagi pemegang saham. Bagi investor, informasi *EPS* merupakan salah satu informasi yang paling penting karena dapat digunakan untuk menilai prospek laba perusahaan di masa mendatang serta menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, *EPS* sering digunakan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham”. Menurut Hutabarat et al. (2023) menyatakan bahwa, “*Earning per Share (EPS)* atau laba per saham merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dialokasikan untuk setiap lembar saham yang beredar. Dengan demikian, EPS dapat digunakan untuk menilai tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari investasi yang ditanamkan pada perusahaan”.

“*Earning per Share (EPS)* merupakan laba yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar dan menjadi bagian keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Besarnya nilai *EPS* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi setiap lembar saham yang dimiliki investor. Peningkatan nilai *EPS* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, nilai *EPS* yang rendah mengindikasikan bahwa keuntungan yang dapat diterima pemegang saham, termasuk potensi dividen, relatif lebih kecil. Selain itu, penurunan *EPS* dapat memberikan sinyal negatif kepada investor sehingga berpotensi menyebabkan penurunan harga saham perusahaan di pasar” (Wijayanto et al. 2022).

Menurut Ambaranny et al. (2021) , “peningkatan nilai *Earnings per Share (EPS)* dapat mendorong meningkatnya permintaan saham perusahaan di pasar modal yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan harga saham perusahaan”. Sejalan dengan hal tersebut, Akbar dan Muniarty (2022) menyatakan bahwa, “semakin tinggi nilai *EPS*, maka semakin besar laba yang diperoleh investor untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Kondisi tersebut dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham perusahaan sehingga permintaan saham meningkat dan berdampak pada kenaikan harga saham di pasar”.

Ardinindya et al. (2022), menjelaskan bahwa “*EPS* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, *EPS* sering dijadikan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan profitabilitas perusahaan”. Menurut Dzakwan et al. (2023), “nilai *EPS* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya melalui peningkatan laba bersih yang

dihasilkan. Peningkatan laba tersebut dapat terjadi karena perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan, seperti memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi”. Selain itu, Akbar dan Muniarty. (2022) menyatakan bahwa, “tingginya nilai *EPS* juga dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan peningkatan kinerja keuangan, terutama dalam aspek penjualan dan laba”.

Menurut Hendrawati (2022), menyatakan bahwa “*EPS* yang tinggi memberikan manfaat bagi pemegang saham karena menunjukkan besarnya laba yang dapat diperoleh dari investasi yang mereka tanamkan. Dengan demikian, tingginya nilai *EPS* dapat menjadi indikator bahwa perusahaan mampu memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para pemegang saham”. Hal ini sejalan dengan pendapat Ambaranny et al. (2021) yang menyatakan bahwa, “nilai *EPS* yang tinggi mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan sehingga mampu menciptakan nilai dan keuntungan bagi investor”. Menurut Kieso et al. (2024), *Earnings Per Share (EPS)* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. “*Earning Per Share (EPS)-Simple Capital Structure* (struktur modal sederhana)”.

“Struktur modal sederhana merupakan struktur modal yang hanya terdiri atas saham biasa atau dapat pula terdiri atas beberapa jenis saham yang tidak memiliki potensi menimbulkan efek dilusi terhadap laba per saham. Apabila perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa diperoleh dengan mengurangi dividen saham preferen periode berjalan dari laba bersih perusahaan. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *EPS* dasar (*basic EPS*)”.

2. “*Earning Per Share (EPS)-Complex Capital Structure* (struktur modal kompleks)”.

“Struktur modal kompleks adalah struktur modal yang mengandung potensi saham biasa yang dapat menimbulkan efek dilusi terhadap laba per saham.

Potensi saham biasa tersebut dapat berasal dari sekuritas konversi, opsi saham, waran, maupun instrumen lainnya yang dapat dikonversi atau digunakan menjadi saham biasa. Sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang apabila dikonversi menjadi saham biasa akan menyebabkan penurunan nilai *EPS*. Perhitungan *EPS* terdilusi (*diluted EPS*) pada dasarnya serupa dengan perhitungan *EPS* dasar, namun memperhitungkan seluruh potensi saham biasa yang bersifat dilutif dan beredar selama periode tertentu. Di sisi lain, terdapat sekuritas yang bersifat anti dilutif, yaitu sekuritas yang apabila dikonversi atau dilaksanakan justru meningkatkan laba per saham atau mengurangi kerugian per saham sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan *EPS* terdilusi”.

Menurut Kieso et al. (2024), “terdapat dua jenis *EPS* dalam struktur modal perusahaan, yaitu:”

1. “*Basic Earning Per Share*”

“*Basic Earning per Share (Basic EPS)* disajikan oleh perusahaan yang memiliki struktur modal sederhana, yaitu perusahaan yang hanya memiliki saham biasa atau tidak memiliki instrumen yang berpotensi dikonversi menjadi saham biasa dan menyebabkan dilusi laba per saham. Dalam perhitungannya, *Basic EPS* melibatkan dua komponen utama, yaitu laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (*Weighted Average Ordinary Shares Outstanding* atau *WAOS*). Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa diperoleh dengan mengurangi laba bersih perusahaan dengan dividen saham preferen, kemudian hasilnya dibagi dengan *WAOS* untuk memperoleh laba per lembar saham biasa”.

2. “*Diluted Earning Per Share*”

“*Diluted Earning per Share (Diluted EPS)* diterapkan pada perusahaan yang memiliki struktur modal kompleks. Struktur modal ini ditandai dengan adanya instrumen keuangan seperti obligasi konversi, saham preferen konversi, opsi saham, waran, atau hak lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham biasa

sehingga berpotensi menurunkan laba per saham. Perusahaan dengan struktur modal kompleks umumnya menyajikan *Basic EPS* dan *Diluted EPS* secara bersamaan. Penyajian kedua jenis *EPS* tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai laba per saham yang sebenarnya terjadi berdasarkan saham yang beredar saat ini serta memberikan gambaran mengenai kemungkinan penurunan laba per saham apabila seluruh instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa dikonversi. Namun, perusahaan tidak menyajikan *Diluted EPS* apabila instrumen yang dimiliki bersifat antidilutif, yaitu instrumen yang apabila dikonversi justru meningkatkan laba per saham atau mengurangi kerugian per lembar saham”.

Menurut Ramadhesinta & Maulana (2023), “Nilai pendapatan per saham dapat naik karena faktor-faktor berikut:”

- 1) “Laba bersih meningkat dan jumlah saham biasa yang beredar menurun”.
- 2) “Laba bersih meningkat dan jumlah saham biasa yang beredar tetap”.
- 3) “Laba bersih tetap dan jumlah saham biasa yang beredar menurun”.
- 4) “Jumlah saham biasa yang beredar lebih besar dari presentase penurunan laba bersih”.
- 5) “Kenaikan laba bersih lebih besar dari kenaikan jumlah saham yang diedar ke publik”.

Menurut Kieso et al. (2024), “Perusahaan harus menyajikan informasi *EPS* dasar dan *EPS dilutive*, seperti berikut:”

Earning per ordinary share

Basic Earning per share xxx

Diluted Earning Per Share xxx

“Apabila dalam suatu periode perusahaan memiliki pendapatan yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan (*discontinued operations*), maka perusahaan wajib menyajikan informasi laba per saham untuk beberapa komponen

secara terpisah, yaitu laba dari operasi yang masih dilanjutkan, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan, serta laba bersih perusahaan. Selain itu, perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan juga harus mengungkapkan jumlah laba per saham untuk masing-masing komponen tersebut, baik secara langsung dalam laporan laba rugi maupun melalui catatan atas laporan keuangan” (Kieso et al. 2024).

Basic earnings per share

<i>Income from continuing operations</i>	<i>xxx</i>
<i>Discontinued operations (loss)</i>	<i><u>(xxx)</u></i>
<i>Net income</i>	<i>xxx</i>

Diluted Earnings Per Share

<i>Income from continuing operations</i>	<i>xxx</i>
<i>Discontinued operations (loss)</i>	<i><u>(xxx)</u></i>
<i>Net income</i>	<i>xxx</i>

Dalam Weygandt et al. (2022), “perhitungan EPS dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$EPS = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Weighted Average Ordinary Share Outstanding (WAOS)}}$$

Keterangan

Earnings Per Share : Laba per lembar saham

Net Income : Laba bersih

Preference Dividends : Dividen untuk pemegang saham preferen

WAOS : Rata-rata jumlah saham biasa yang beredar

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), “pendapatan merupakan arus masuk manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional normal selama suatu periode tertentu. Arus masuk tersebut mengakibatkan peningkatan ekuitas perusahaan, namun tidak berasal dari kontribusi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan”. Menurut Wijayanto et al. (2022), “*Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan yang dilakukan. Laba bersih yang digunakan dalam perhitungan ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya dan beban, termasuk pajak. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap penjualan”. Menurut Weygandt et al. (2022), “laba bersih diperoleh melalui beberapa tahapan perhitungan. Proses tersebut diawali dengan pendapatan penjualan yang dikurangi potongan penjualan (*sales discount*) dan retur serta pengurangan harga jual (*sales return and allowance*) sehingga menghasilkan penjualan bersih (*net sales*). Selanjutnya, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) untuk memperoleh laba kotor (*gross profit*). Laba kotor kemudian dikurangi berbagai beban operasional sehingga menghasilkan laba usaha (*income from operations*). Setelah itu, laba usaha dikurangi beban bunga yang berasal dari obligasi maupun wesel sehingga diperoleh laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak kemudian dikurangi pajak penghasilan (*income tax*) untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Laba bersih mencerminkan peningkatan aset bersih perusahaan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham. Sebagian laba bersih dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, yaitu pembagian kas atau aset lainnya. Meskipun pembagian dividen mengurangi saldo laba yang dimiliki perusahaan, dividen tidak diklasifikasikan sebagai beban karena merupakan distribusi laba kepada pemegang saham, bukan biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan”.

Menurut Kieso et al. (2024), “saham dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:”

1. “*Ordinary Shares*, Saham biasa (*ordinary shares*) mencerminkan sisa hak kepemilikan atas aset perusahaan setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi. Pemegang saham biasa menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi serta berhak memperoleh manfaat dari keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, pemegang saham biasa dapat menerima pembagian dividen apabila perusahaan memutuskan untuk mendistribusikan laba. Dalam kondisi likuidasi, pemegang saham biasa juga berhak atas sisa aset perusahaan setelah seluruh kewajiban dan hak pemegang saham prioritas lainnya telah diselesaikan”.
2. “*Preference Shares*, saham yang memiliki hak istimewa dibandingkan saham biasa, seperti prioritas dalam pembagian dividen dan aset saat likuidasi. Saham ini juga dapat dikonversi menjadi saham biasa atau ditebus kembali oleh perusahaan, namun umumnya tidak memiliki hak suara”.
3. “*Treasury Shares* merupakan saham biasa yang telah dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham dan disimpan oleh perusahaan”.

Menurut Weygandt et al. (2022) dalam bukunya “terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penerbitan saham:”

1. “*Authorized Shares*, jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam akta pendirian perusahaan”.
2. “*Issued Shares*, jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan kepada para pemegang saham”.
3. “*Outstanding Shares*, jumlah saham yang beredar dan dimiliki oleh pemegang saham, tidak termasuk saham treasuri (*treasury shares*)”.

Dalam Weygandt et al. (2022), “juga menjelaskan bahwa perusahaan dapat menerbitkan saham tambahan yang dikenal sebagai saham preferen (*preferred shares*). Saham preferen merupakan jenis saham yang memiliki hak istimewa atau prioritas tertentu dibandingkan saham biasa. Umumnya, pemegang saham preferen memperoleh prioritas dalam pembagian dividen dan klaim atas aset perusahaan apabila terjadi likuidasi. Oleh karena itu, dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan, saham preferen biasanya disajikan sebelum saham biasa. Pemegang

saham preferen berhak menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Selain itu, saham preferen sering kali memiliki fitur dividen kumulatif, yaitu ketentuan yang mengharuskan perusahaan membayarkan dividen tahun berjalan serta dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya kepada pemegang saham preferen sebelum membagikan dividen kepada pemegang saham biasa. Dividen preferen yang belum diumumkan atau belum dibayarkan pada periode tertentu disebut sebagai tunggakan dividen (*dividends in arrears*)”.

Menurut Kieso et al. (2024) “rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (*weighted-average ordinary shares outstanding*) selama suatu periode menjadi dasar dalam menentukan jumlah laba per saham yang dilaporkan. Jumlah saham yang diterbitkan maupun dibeli kembali selama periode berjalan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, setiap perubahan jumlah saham harus diperhitungkan berdasarkan lamanya saham tersebut beredar dalam periode yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah setara seluruh saham yang beredar selama periode tersebut secara lebih akurat”. Menurut Weygandt et al. (2022), “menjelaskan bahwa *outstanding shares* merupakan saham yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang saham. Sementara itu, *authorized shares* menunjukkan jumlah maksimum saham yang diizinkan untuk diterbitkan dan dijual oleh perusahaan. Adapun *issuance of shares* merupakan proses penerbitan saham oleh perusahaan kepada investor, baik melalui penawaran umum maupun mekanisme lainnya”. Dalam Kieso et al. (2024), “menyatakan bahwa rata-rata jumlah saham yang beredar merupakan rata-rata jumlah saham yang beredar selama suatu periode tertentu. Jumlah saham yang diterbitkan atau dibeli kembali selama periode berjalan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar. Dalam perhitungan *Earnings per Share (EPS)*, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar digunakan sebagai dasar dalam menentukan laba per saham yang dilaporkan. Oleh karena itu, saham yang diterbitkan atau dibeli kembali selama periode tersebut harus diberikan bobot berdasarkan proporsi waktu beredarnya agar dapat diperoleh jumlah saham beredar yang mencerminkan kondisi sebenarnya selama periode pelaporan”. Berdasarkan PSAK 233 “penggunaan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama suatu periode dimaksudkan untuk

mencerminkan perubahan jumlah modal pemegang saham yang terjadi akibat bertambah atau berkurangnya jumlah saham yang beredar. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dihitung dengan menjumlahkan saham biasa yang beredar pada awal periode dan menyesuaikan dengan saham yang diterbitkan maupun dibeli kembali selama periode berjalan, kemudian dikalikan dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hari suatu kelompok saham beredar dengan jumlah hari dalam satu periode pelaporan. Dalam praktiknya, penggunaan pendekatan yang dianggap wajar untuk menentukan rata-rata tertimbang juga dapat diterima”.

Salah satu komponen utama dalam perhitungan *EPS* adalah laba bersih (*net income*). Menurut Kieso et al. (2024) “laba bersih merupakan hasil akhir kinerja perusahaan selama suatu periode setelah seluruh pendapatan dan beban diperhitungkan. Laba bersih dianggap sebagai salah satu indikator terpenting dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan perusahaan selama periode tertentu”. Sejalan dengan hal tersebut, Weygandt et al. (2022) menjelaskan bahwa, “laba bersih terjadi ketika jumlah pendapatan perusahaan melebihi seluruh beban yang dikeluarkan selama periode berjalan. Pendapatan (*revenue*) merupakan peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemegang saham. Sebaliknya, beban (*expenses*) merupakan penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Oleh karena itu, laba bersih sering digunakan sebagai ukuran penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam suatu periode”.

Kieso et al. (2024) menjelaskan bahwa “ketika suatu perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, perusahaan tersebut dianggap memiliki kepemilikan pengendali (*controlling interest*). Dalam hubungan tersebut, perusahaan yang melakukan investasi disebut sebagai perusahaan induk (*parent company*), sedangkan perusahaan yang diinvestasikan disebut sebagai perusahaan anak (*subsidiary*). Pada laporan keuangan terpisah, investasi dalam saham biasa perusahaan anak dicatat sebagai investasi jangka panjang oleh perusahaan induk.

Namun, karena perusahaan induk memiliki pengendalian atas perusahaan anak, perusahaan induk pada umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan perusahaan induk dan perusahaan anak sebagai satu kesatuan entitas ekonomi”.

2.4 Leverage

Menurut Weygandt et al. (2022) “rasio *leverage* atau solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan yang dimilikinya”. Menurut Rusdi & Helmayunita (2023), “rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari utang”. Menurut Amelia & Meidiyustiani (2024), “*leverage* mengacu pada penggunaan dana pinjaman oleh perusahaan untuk membiayai aset yang dimilikinya. Meskipun penggunaan utang dapat membantu perusahaan memperoleh tambahan sumber pendanaan, penggunaan utang yang berlebihan dianggap kurang baik karena berpotensi mengurangi laba perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, tingginya tingkat utang dapat meningkatkan risiko kesulitan keuangan karena perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang dimiliki. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya nilai perusahaan”.

Menurut Ross et al. (2022), “rasio *long-term solvency* terdiri atas:”

1. “*Total debt ratio*”

- a. “*Total debt ratio*”

“Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aset perusahaan. Rasio tersebut menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang”.

- b. “*Debt-equity ratio*”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini menggambarkan struktur permodalan perusahaan serta tingkat penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri”.

c. *“Equity multiplier”*

“Rasio ini mengukur perbandingan antara total aset dan total ekuitas”.

d. *“Long-term debt ratio”*

“Rasio ini mengukur proporsi kewajiban jangka panjang terhadap total kapitalisasi perusahaan”.

2. *“Times interest earned ratio”*

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga atas utangnya. Kemampuan perusahaan dalam membayar bunga tepat waktu menjadi salah satu faktor penting dalam menilai tingkat risiko keuangan perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak (*Earnings Before Interest and Taxes* atau *EBIT*) dengan beban bunga (*interest expense*)”.

3. *“Cash coverage ratio”*

“Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur ketersediaan arus kas yang dapat digunakan perusahaan dalam memenuhi berbagai kewajibannya”.

Dalam penelitian ini, rasio *leverage* yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* “*Debt to equity ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dengan menggunakan pendanaan yang ada” (Sari et al., 2021). “Nilai *DER* kurang dari 1, maka penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan lebih rendah dibandingkan penggunaan ekuitas. Sebaliknya, apabila nilai *DER* lebih dari 1, maka penggunaan utang lebih dominan dibandingkan ekuitas dalam struktur pendanaan perusahaan” (Ross et al., 2022). Menurut Pribadi

et al. (2024), “perusahaan yang memiliki nilai *DER* rendah cenderung lebih menarik bagi investor karena menunjukkan tingkat risiko keuangan yang lebih rendah. Selain itu, kondisi tersebut dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik serta memberikan harapan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan minat investor dan mendorong kenaikan harga saham perusahaan”.

Semakin rendah *DER* berarti bahwa penggunaan ekuitas yang lebih banyak daripada utang. “Jika rasio ini kurang dari 1, maka perusahaan mendanai lebih banyak aset dengan ekuitas dibandingkan dengan utang. Pemilihan struktur modal dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya modal perusahaan, dimana ekuitas tidak menambah risiko kebangkrutan. Dengan memiliki lebih banyak ekuitas, perusahaan mungkin lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pasar atau kebutuhan investasi jangka panjang. Ekuitas digunakan perusahaan untuk menghindari beban bunga apabila kondisi pasar dalam kondisi yang kurang stabil. Selain itu, perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi cenderung untuk menggunakan lebih banyak ekuitas dalam struktur modal mereka untuk mengurangi risiko keuangan (pailit)” (Miller-Nobles et al., 2021).

“Salah satu kelemahan pendanaan melalui ekuitas adalah tingginya biaya informasi (*information cost*) yang harus ditanggung perusahaan. Penerbitan saham cenderung dihindari karena perusahaan dianggap tidak harus sepenuhnya mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal yang dianggap sebagai biaya informasi” (Rahman et al., 2024). “Dengan adanya pengungkapan informasi yang sedikit ke pihak luar, keputusan pendanaan perusahaan akan mengalami *asymmetric information*, yaitu kondisi ketika manajer memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar” (Brealey et al., 2022). “Asimetri informasi dapat memengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan secara signifikan. Sementara itu, dampak yang sama juga dapat terjadi pada pendanaan utang, meskipun tidak sebesar pada ekuitas” (Schoenmaker & Schramade, 2023).

Semakin tinggi *DER* dan lebih dari 1, berarti bahwa penggunaan utang yang lebih banyak daripada ekuitas. Menurut Weygandt et al. (2022),

“penggunaan pendanaan yang berasal dari utang memiliki beberapa keuntungan, yaitu:”

1. “Kendali pemegang saham tidak mengalami perubahan karena kreditur tidak memiliki hak suara dalam perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham tetap dapat mempertahankan kendali penuh atas perusahaan”.
2. “Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, sedangkan dividen tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang pajak”.
3. “Meskipun beban bunga dari utang dapat menurunkan laba bersih, penggunaan utang dapat membuat laba per saham menjadi lebih tinggi karena perusahaan tidak perlu menerbitkan saham tambahan”.

Sedangkan menurut Weygandt et al. (2022) penggunaan pendanaan yang berasal dari utang juga memiliki beberapa kekurangan, “Kekurangan utama dari pendanaan utang adalah adanya kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Selain itu, perusahaan juga harus melunasi nilai pokok utang pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang memiliki pendapatan tidak stabil dan arus kas yang relatif lemah dapat mengalami kesulitan dalam membayar bunga, terutama ketika pendapatan perusahaan sedang menurun. Selanjutnya, apabila kondisi ekonomi, pasar, sekuritas, atau pendapatan perusahaan mengalami penurunan, pembayaran utang dapat mengurangi kas perusahaan secara cepat dan membatasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya”.

Dalam penelitian ini *leverage* diukur menggunakan *Debt to equity ratio*. Menurut Miller-Nobles et al. (2021) “rumus *DER* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut”

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Keterangan:

Total Debt : Total utang perusahaan

Total Equity : Total ekuitas perusahaan

Menurut Weygandt et al. (2022), “Kewajiban merupakan klaim pihak lain terhadap aset perusahaan yang timbul akibat adanya utang dan berbagai kewajiban lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan dari berbagai skala umumnya memperoleh pendanaan melalui pinjaman serta melakukan pembelian barang atau jasa secara kredit sehingga menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi di masa mendatang”. Menurut Kieso et al. (2024) “Dengan kata lain, liabilitas memiliki tiga karakteristik penting:”

1. “Merupakan kewajiban saat ini”.
2. “Memerlukan transfer sumber daya ekonomi (uang tunai, barang, jasa)”.
3. “Timbul dari peristiwa masa lalu”.

Menurut Kieso et al. (2024) “*Liabilities* dibagi menjadi dua, yaitu:”

1. “*Current Liabilities*”

“Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal pelaporan, tergantung mana yang lebih lama. Penyelesaian kewajiban tersebut umumnya menggunakan aset lancar atau menimbulkan kewajiban lancar lainnya”.

2. “*Non-current Liabilities*”

“Kewajiban tidak lancar merupakan kewajiban yang tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu satu tahun. Kewajiban ini umumnya memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun dan akan diselesaikan pada waktu tertentu di masa mendatang”.

Menurut Kieso et al. (2024), “secara umum, *Current Liabilities* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:”

1. “*Accounts Payable*”

“Utang usaha atau utang dagang merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang dagang, persediaan, atau jasa secara kredit. Kewajiban ini muncul karena terdapat selisih waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan waktu pembayarannya”.

2. *“Notes Payable”*

“Utang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan di masa depan. Utang wesel dapat timbul dari transaksi pembelian, pembiayaan, maupun transaksi lainnya”.

3. *“Current Maturities of Long-Term Debt”*

“Merupakan bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam periode satu tahun berikutnya, seperti obligasi, hipotek, dan utang jangka panjang lainnya.

4. *“Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced”*

“Merupakan kewajiban jangka pendek yang dijadwalkan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan”.

5. *“Dividends Payable”*

“Utang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham atas dividen tunai yang telah diumumkan dan disetujui oleh dewan direksi atau melalui persetujuan pemegang saham”.

6. *“Customer Advances and Deposits”*

“Kewajiban ini berasal dari uang muka atau setoran yang diterima perusahaan dari pelanggan maupun karyawan yang pada kondisi tertentu dapat dikembalikan”.

7. *“Unearned Revenues”*

“Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan kas yang diperoleh perusahaan sebelum barang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan”.

8. *“Sales and Value-Added Taxes Payable”*

“Kewajiban ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas barang atau jasa pada setiap tahap produksi maupun penjualan kepada konsumen akhir”.

9. “*Income Taxes Payable*”

“Pajak penghasilan terutang merupakan kewajiban perusahaan atas pajak yang dihitung berdasarkan laba bersih dan harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar”.

10. “*Employee-Related Liabilities*”

“Kewajiban yang berkaitan dengan kompensasi karyawan, seperti gaji dan upah yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Selain itu, kewajiban ini juga mencakup pemotongan gaji (*payroll deductions*), ketidakhadiran yang mendapat kompensasi (*compensated absences*), dan bonus karyawan (*bonuses*)”.

Sedangkan menurut Kieso et al. (2024), “*Non-current liabilities* (terkadang disebut *long-term debt*) terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam waktu satu tahun atau *operating cycle* perusahaan, mana yang lebih lama. Secara umum, kewajiban tidak lancar terdiri dari tiga jenis:”

1. “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang”.
2. “Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan”.
3. “Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengonfirmasi jumlah yang harus dibayarkan, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti garansi layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, yang sering disebut sebagai ketentuan”.

Menurut Kieso et al. (2024), “*non-current liabilities* terdiri dari:”

1. “*Bonds Payable*”

“Utang obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah pokok utang pada tanggal jatuh tempo tertentu disertai pembayaran bunga secara berkala sesuai tingkat bunga yang telah ditetapkan”.

2. “*Long-term Notes Payable*”

“Utang wesel jangka panjang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa mendatang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun atau melebihi satu siklus operasi perusahaan”.

3. “*Mortgages Payable*”

“Kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan hak kepemilikan atas properti sebagai agunan pinjaman”.

4. “*Pension Liabilities*”

“Kewajiban jangka panjang yang timbul dari program pemberian manfaat kepada karyawan setelah memasuki masa pensiun sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan selama masa kerja”.

5. “*Lease Liabilities*”

“Kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian sewa antara pihak pemberi sewa (*lessor*) dan pihak penyewa (*lessee*)”.

Menurut Kieso et al. (2024), “perbedaan *Current liabilities* dan *Non current liabilities* memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Likuiditas kewajiban adalah perkiraan waktu yang akan berlalu sebelum kewajiban tersebut dibayarkan. Dengan kata lain, kewajiban yang akan segera dibayarkan adalah kewajiban lancar. Perusahaan yang likuid lebih mampu bertahan terhadap penurunan keuangan. Selain itu, perusahaan memiliki peluang yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang berkembang. *Current Liabilities* dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi berikut berlaku:”

1. “Kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan.

2. “Kewajiban yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan”.

Sedangkan menurut Kieso et al. (2024), “*Non-current liabilities* (terkadang disebut *long-term debt*) terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam waktu satu tahun atau *operating cycle* perusahaan, mana yang lebih lama, Secara umum, kewajiban tidak lancar terdiri dari tiga jenis”.

1. “Kewajiban yang timbul akibat aktivitas pendanaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, serta wesel bayar jangka panjang”.
2. “Kewajiban yang muncul dari kegiatan operasional normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan”.
3. “Kewajiban yang jumlah, penerima pembayaran, atau waktu pembayarannya bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa mendatang. Contohnya adalah garansi produk atau jasa, kewajiban lingkungan, dan biaya restrukturisasi yang umumnya dikategorikan sebagai provisi”.

“Semakin besar proporsi utang yang digunakan dalam struktur modal perusahaan, maka semakin tinggi pula risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban tetap berupa pembayaran bunga yang harus dipenuhi pada saat jatuh tempo. Beban bunga yang semakin besar dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan laba per lembar saham atau *Earnings per Share*” (Purnomo., 2022). “nilai *Debt to Equity Ratio* (*DER*) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak memanfaatkan pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penggunaan utang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap nilai *EPS* yang dihasilkan (Putri et al., 2022). Menurut Marcelina & Setiawan (2022) menyatakan, “investor umumnya lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki nilai *DER* rendah karena menunjukkan

tingkat utang yang relatif kecil dibandingkan modal yang dimiliki. Kondisi tersebut dianggap lebih aman bagi investor karena keuntungan perusahaan tidak banyak digunakan untuk memenuhi kewajiban utang, sehingga peluang memperoleh imbal hasil menjadi lebih besar dan menjelaskan bahwa sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari modal sendiri (ekuitas) maupun utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Besarnya penggunaan utang dalam struktur permodalan mencerminkan tingkat *leverage* perusahaan. Tingkat *leverage* tersebut dapat memengaruhi besar kecilnya *EPS* yang diterima pemegang saham, sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada setiap lembar saham yang beredar”.

2.4.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Earnings Per Share*

Berdasarkan penelitian Siregar et al. (2024), menunjukkan bahwa “*Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Earnings Per Share*”. Dan berdasarkan penelitian Fenny & Kurniawan (2022), menunjukkan bahwa “*Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Earnings Per Share*” Sedangkan berdasarkan penelitian Putri et al. (2022) menunjukkan “*Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share*”. Berdasarkan penjelasan mengenai *Debt to Equity Ratio* dan pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Earnings Per Share*, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_{a1}: *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Earnings Per Share*

2.5 Likuiditas

Menurut Weygandt et al. (2022), “rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo serta kebutuhan kas yang tidak terduga. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban lancarnya”. Menurut Fitriana (2024), “rasio likuiditas (*liquidity ratio*) rasio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain,

apabila perusahaan ditagih atas utang yang telah jatuh tempo, perusahaan diharapkan mampu melunasi kewajiban tersebut tepat waktu”. Menurut Poerba et al. (2024), “tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik”. Menurut Weygandt et al. (2022), “terdapat empat rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan yaitu:”

1. “*Current Ratio*”

“*Current Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar”.

2. “*Acid-test ratio*”

“*Acid-Test Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan menggunakan aset yang paling likuid. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah kas, investasi jangka pendek, dan piutang bersih dengan kewajiban lancar”.

3. “*Accounts Receivable Turnover*”

“Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas piutang perusahaan. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang usaha bersih”.

4. “*Inventory turnover*”

“*Inventory Turnover* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa sering persediaan perusahaan berputar atau terjual selama satu periode tertentu. Rasio ini dihitung dengan membandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan”.

Penelitian ini menggunakan *Current Ratio (CR)* sebagai proksi dari Likuiditas. Menurut Weygandt et al. (2022) “*Current Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki”. Menurut Poerba et al. (2024) menjelaskan bahwa, “*Current Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Nilai *Current Ratio* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keterbatasan modal kerja, sedangkan nilai *Current Ratio* yang tinggi mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik”. Menurut Kasmir (2021), “Menyatakan bahwa perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut dikatakan tidak likuid”.

“Nilai *Current Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah aset lancar yang lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki, sehingga aset perusahaan dapat dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi”. (Chandra & Osesoga 2021). Menurut Weygandt et al. (2022), “*Current Ratio* dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. *Current Ratio* dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut”.

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan:

CR : *Current Ratio*

Current Asset : Jumlah aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

Current Liabilities : Jumlah kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Kieso et al. (2024), “*Current Assets* merupakan kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam waktu satu tahun atau selama satu siklus operasi perusahaan. Aset lancar umumnya terdiri atas kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka”. Menurut Weygandt et al. (2022), “*Current Ratio* juga sering

dikenal sebagai *working capital ratio*". Menurut Kieso et al. (2024), "Menjelaskan bahwa selisih antara total aset lancar dan total kewajiban lancar disebut modal kerja (*working capital*) atau modal kerja bersih (*net working capital*). Modal kerja mencerminkan sumber daya bersih perusahaan yang relatif likuid dan berfungsi sebagai penyangga likuiditas untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan".

Menurut Weygandt et al. (2022) "*Current Assets* merupakan aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun maupun satu siklus operasi perusahaan".

Menurut Weygandt et al. (2022), "terdapat beberapa tipe *Current Assets*, yaitu:"

1. "*Cash*"

"Kas terdiri atas uang tunai, cek, wesel, serta dana yang disimpan di bank atau lembaga penyimpanan lainnya. Selain itu, kas dan setara kas mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah dikonversi menjadi sejumlah kas tertentu".

2. "*Short-term Investments*"

"Investasi jangka pendek merupakan surat berharga yang dimiliki perusahaan dan direncanakan untuk dicairkan menjadi kas dalam periode satu tahun berikutnya".

3. "*Notes Receivable*"

"Piutang wesel merupakan janji tertulis yang memberikan hak kepada perusahaan untuk menerima sejumlah uang tertentu pada masa mendatang, biasanya disertai pembayaran bunga".

4. "*Account Receivable*"

"Piutang usaha merupakan tagihan kepada pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Umumnya piutang usaha dapat ditagih dalam jangka waktu 30 hingga 60 hari".

5. "*Inventories*"

“Persediaan merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi guna mendukung kegiatan usaha perusahaan”.

6. *“Prepaid Expense”*

“Beban dibayar di muka merupakan pembayaran yang telah dilakukan sebelum manfaat ekonominya diterima. Contohnya meliputi asuransi, perlengkapan, biaya iklan, dan biaya sewa. ”

Menurut Weygandt et al. (2022), “*current liabilities* merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan”. Menurut Kieso et al. (2024), “secara umum, kewajiban lancar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:”

1. *“Accounts Payable”*

“Utang usaha merupakan kewajiban yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit dan belum dilakukan pembayaran”.

2. *“Notes Payable”*

“Utang wesel merupakan kewajiban berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan di masa mendatang. Kewajiban ini dapat timbul dari aktivitas pembelian, pendanaan, maupun transaksi lainnya”.

3. *“Current Maturities of Long-Term Debt”*

“Merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam periode satu tahun berikutnya, seperti obligasi, hipotek, maupun bentuk utang jangka panjang lainnya”.

4. *“Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced”*

“Merupakan kewajiban jangka pendek yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan”.

5. *“Dividends Payable”*

“Utang dividen merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham atas dividen tunai yang telah disetujui untuk dibagikan oleh dewan direksi atau melalui persetujuan pemegang saham”.

6. *“Customer Advances and Deposits”*

“Kewajiban ini berupa uang muka dan setoran yang diterima perusahaan dari pelanggan maupun karyawan yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku”.

7. *“Unearned Revenues”*

“Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan yang diperoleh perusahaan sebelum barang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan”.

8. *“Sales and Value-Added Taxes Payable”*

“Pajak pertambahan nilai merupakan kewajiban pajak atas barang atau jasa yang dikenakan pada setiap tahap produksi hingga penjualan kepada konsumen akhir”.

9. *“Income Taxes Payable”*

“Pajak penghasilan terutang merupakan kewajiban perusahaan atas laba yang diperoleh dan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar berdasarkan perhitungan perpajakan yang berlaku”.

10. *“Employee-Related Liabilities”*

“Kewajiban terkait karyawan merupakan kewajiban yang timbul atas kompensasi yang masih harus dibayarkan kepada karyawan pada akhir periode akuntansi. Selain itu, perusahaan juga sering melaporkan sebagai kewajiban lancar hal-hal berikut yang berkaitan dengan kompensasi karyawan:”

- a. *“Payroll deductions* (pemotongan gaji)”.
- b. *“Compensated absences* (ketidakhadiran yang diberi kompensasi)”.
- c. *“Bonuses* (bonus)”.

Menurut Ristiani & Sudarsi (2022), “perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi mencerminkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan

kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Meningkatnya minat investor berpotensi memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan”. Menurut Putri et al. (2022) menyatakan bahwa, “*Current Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo ketika ditagih”. Sementara itu, Faruq et al. (2021) menjelaskan bahwa “*Earnings per Share (EPS)* dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan perusahaan. Peningkatan nilai *Current Ratio* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga kondisi tersebut berpotensi meningkatkan nilai *Earnings per Share (EPS)*”. Dalam penelitian Faruq et al. (2021) menyatakan bahwa, “*Earning Per Share* mampu menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Peningkatan *Current Ratio* memberi gambaran bahwasannya sebuah perusahaan dapat menutupi sebuah kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat berpotensi meningkatkan *Earnings Per Share*”.

2.5.1 Pengaruh Likuiditas terhadap *Earnings Per Share*

Berdasarkan hasil penelitian Putri et al. (2022) “*Current Ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap *EPS*”. dan Faruq et al. (2021) menyatakan bahwa, “*Current Ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap *EPS*”. Namun dalam penelitian Hendrawati (2022), “tidak ada pengaruh *Current Ratio* secara parsial terhadap *Earnings Per Share (EPS)*”. Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Haz: Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap *Earnings Per Share*

2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Susesti & Wahyuningtyas (2022), “ukuran perusahaan dapat diukur melalui tingkat penjualan bersih maupun total aset yang dimiliki perusahaan yang tercermin dalam laporan posisi keuangan akhir periode. Semakin besar jumlah sumber daya berupa aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula

ukuran perusahaan tersebut”. Dalam Astiti (2024), “perusahaan dengan ukuran yang besar menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengakses pasar modal karena investor cenderung memberikan respon positif terhadap perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Respon positif tersebut mencerminkan meningkatnya nilai perusahaan”. Selain itu menurut Setiowati et al. (2023), “menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan bentuk penilaian terhadap besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi penting bagi investor maupun kreditur karena berkaitan dengan tingkat risiko investasi. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber pendanaan”. Menurut Purnama & Taufiq (2021) “ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa indikator, seperti total aset, log size, dan nilai pasar saham. Secara umum, ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil, dengan total aset sebagai salah satu dasar pengukurannya”.

Dalam Rahmad et al. (2023), “menjelaskan bahwa kinerja keuangan dan ukuran perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan perusahaan, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Melalui laporan tersebut dapat dilakukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan data keuangan yang tersedia”. Menurut Yulimtinan et al. (2021), “aset yang besar cenderung lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil karena memiliki kontrol yang lebih baik terhadap pasar serta dianggap lebih mampu menghadapi persaingan ekonomi”.

Berikut adalah klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah:

1. “Emiten skala kecil adalah emiten dengan total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 berdasarkan laporan keuangan dalam dokumen pernyataan pendaftaran”.
2. “Emiten skala menengah adalah emiten dengan total aset lebih dari Rp50.000.000.000,00 hingga Rp250.000.000.000,00”.
3. “Emiten skala besar adalah emiten dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00”.

Menurut Munawir (2016) dalam Rahmad et al. (2023), rumus dari ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$SIZE = Ln \text{ Total Aset}$$

Keterangan : Ukuran Perusahaan

$Ln \text{ Total Assets}$: Logaritma natural dari total aset perusahaan

Menurut Kieso et al. (2024), “sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*). Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut”.

Menurut Weygandt et al. (2022) aset terbagi menjadi:

1. “*Intangible Assets*

“*Intangible assets* atau aset tidak berwujud merupakan aset jangka panjang yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi perusahaan. Contoh dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai signifikan adalah *goodwill*. Selain itu, aset tidak berwujud juga mencakup *patents*, *copyrights*, serta *trademarks* atau *trade names* yang memberikan hak

eksklusif kepada perusahaan untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu”.

2. “*Property, Plant, and Equipment* *Property, plant and equipment* atau aset tetap”

“*Property, plant, and equipment* atau aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat relatif panjang dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset ini juga dikenal sebagai *fixed assets* yang mencakup tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan operasional, serta furnitur”.

3. “*Long-term Investment* *Long-term invesment* atau investasi jangka panjang”

“*Long-term investment* atau investasi jangka panjang umumnya mencakup investasi dalam bentuk saham biasa maupun obligasi pada perusahaan lain yang dimiliki dalam jangka waktu panjang, serta aset non-lancar seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan”.

4. “*Current Asset*”

“*Current Assets* atau aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Contohnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Menurut Weygandt et al. (2022), “*current asset* dibagi menjadi:”

- 1) “*Cash*”

“Kas dan setara kas juga mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu”.

- 2) “*Short-term Investment*”

“*Short-term investment* adalah surat berharga yang dimiliki perusahaan yang dapat dipasarkan dan direncanakan untuk dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih lama”.

- 3) “*Receivables*”

“Istilah yang mengacu pada jumlah yang harus diterima perusahaan dari individu maupun entitas lain. Piutang merupakan klaim yang diharapkan akan ditagih dalam bentuk kas”.

4) “*Inventories*”

“*Inventories* merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasional perusahaan”.

5) “*Prepaid Expense*”

“*Prepaid expense* adalah biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sebelum manfaat ekonominya diterima atau digunakan oleh perusahaan”.

Menurut Kammagi (2023) “ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur salah satunya melalui jumlah aset yang dikuasai perusahaan. Perusahaan yang tergolong besar cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi karena perusahaan besar memiliki kemudahan dalam memperoleh sumber dana baik dari pihak internal maupun eksternal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila sumber dana tersebut dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga nilai perusahaan akan meningkat karena investor akan terdorong untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total asetnya, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan *Earnings per Share (EPS)*, karena semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula potensi aset tersebut digunakan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi bagi pemegang saham.

2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Earnings Per Share*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyawati & Ferdian (2024) juga menyatakan bahwa, “ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *EPS*”. Sedangkan dalam penelitian Reztrianti (2023), Sumantri & Pradnyani, (2025) dan Rahmad et al. (2023), menyatakan bahwa “ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share*”.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Earnings Per Share*

2.7 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Nugrahani et al. (2022), “dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan perlu memperhatikan penerapan tata kelola yang baik yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance (GCG)*. Penerapan *GCG* menjadi penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku”. Menurut KNKG (2006) “pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai syarat tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa unsur penting dalam *GCG* tersebut antara lain kepemilikan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, serta komite audit. Selain itu, tanggung jawab tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi pihak pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan” Menurut Zahrawani & Sholikhah (2021), “*Corporate Governance* mengacu pada sistem praktik, kebijakan, dan prosedur yang memandu pelaksanaan bisnis. Sistem dan prosedur berfungsi sebagai pedoman untuk menjadikan organisasi lebih akuntabel dan etika pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini disebutkan bahwa tata kelola tidak hanya pada aturan-aturan dan prosedur, namun juga memperhatikan soal etika organisasi”

Menurut Zahrawani & Sholikhah (2021), “definisi tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi jika dikaitkan dengan perusahaan perbankan adalah bagaimana menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya

pertumbuhan perusahaan/bank. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat”. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa “*GCG (Good Corporate Governance)* adalah menyatakan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan seperangkat prinsip yang menjadi dasar dalam proses serta mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta etika dalam berusaha. *Corporate governance* juga merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang mencakup berbagai hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya”.

Merujuk pada Peraturan BI No.11/33/PBI/2009, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Transparansi (*Transparency*), Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan”.
2. “Akuntabilitas (*Accountability*) Kejelasan fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif”.
3. “Pertanggungjawaban (*Responsibility*) Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat”.
4. “Independen (*Independency*) Memiliki kompetensi, mampu bersifat objektif dan bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah”.
5. “Kewajaran (*Fairness*) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam penelitian ini *GCG* diproksikan dengan Dewan direksi. Menurut Nugrahani et al. (2022), “Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang

memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengendalikan jalannya operasional perusahaan, sekaligus berperan dalam menjalin komunikasi dengan para pemegang saham dan investor lainnya melalui laporan keuangan tahunan serta ringkasan kondisi kesehatan perusahaan”. Menurut Sudarmanto et al. (2021), “direksi sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Setiap anggota direksi dapat menjalankan tugas serta mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya masing-masing, namun pelaksanaan tugas tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota direksi. Kedudukan setiap anggota direksi, termasuk direktur utama, pada dasarnya adalah setara. Direktur utama berperan sebagai primus inter pares yang bertugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan direksi”.

Menurut Nasfi (2022) rumus dari dewan direksi sebagai berikut:

$$\text{Dewan Direksi (DIR)} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

Keterangan :

$\sum \text{Dewan Direksi}$: Jumlah dewan direksi

Menurut Sudarmanto et al. (2021), “jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Prasyarat terkait pemilihan dan pemberhentian Direksi sebagai berikut:”

1. “Anggota direksi diangkat dan dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme yang dilakukan secara transparan. Pada perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek, perusahaan milik negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun serta mengelola dana masyarakat, perusahaan yang menyediakan produk atau jasa untuk konsumsi luas masyarakat, serta perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, proses penilaian calon anggota

direksi dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi”.

2. “Pemberhentian anggota direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS apabila disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum keputusan diambil”.
3. “Seluruh anggota direksi juga diwajibkan berdomisili di Indonesia, yaitu pada lokasi yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas pengelolaan perusahaan secara efektif dalam kegiatan operasional sehari-hari”.

Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (Sudarmanto et al., 2021)

1. “Komposisi direksi harus disusun sedemikian rupa agar memungkinkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan tepat, serta tetap mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya”.
2. “Direksi juga dituntut untuk bersikap profesional dengan menjunjung tinggi integritas serta memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugas yang diemban”.
3. “Direksi memiliki tanggung jawab dalam mengelola perusahaan agar mampu menghasilkan keuntungan (profitabilitas) serta menjaga keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang”.
4. “Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Sudarmanto et al. (2021), “fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi sesuai dengan Pedoman Umum GCG Indonesia mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu”.

1. “Kepengurusan”

- a) “Direksi memiliki kewajiban untuk merumuskan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta program jangka panjang dan jangka pendek yang kemudian dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
- b) “Direksi bertanggung jawab dalam mengelola serta mengendalikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien”.
- c) “Direksi harus mempertimbangkan serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan secara wajar”.
- d) “Direksi dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada komite yang dibentuk atau kepada karyawan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab akhir tetap berada pada Direksi”.
- e) “Direksi wajib memiliki pedoman kerja dan tata tertib (charter) agar pelaksanaan tugas lebih terarah, efektif, serta dapat dijadikan dasar penilaian kinerja”.

2. “Manajemen Risiko”

- a) “Direksi berkewajiban menyusun dan menerapkan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan”.
- b) “Setiap keputusan strategis, termasuk pengembangan produk atau jasa baru, harus mempertimbangkan risiko secara cermat dengan menyeimbangkan potensi hasil dan beban risiko”.
- c) “Untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan optimal, perusahaan perlu memiliki unit atau pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko”.

3. “Pengendalian Internal”

- a) “Direksi harus membangun dan menjalankan sistem pengendalian internal yang andal untuk menjaga aset, kinerja perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan”.
- b) “Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BUMN, BUMD, maupun perusahaan yang menghimpun dana masyarakat atau berdampak luas, wajib memiliki unit pengawasan internal”.

- c) “Fungsi pengawasan internal membantu Direksi dalam mencapai tujuan perusahaan melalui evaluasi program, pemberian rekomendasi peningkatan pengendalian risiko, penilaian kepatuhan terhadap regulasi dan *GCG*, serta mendukung proses audit eksternal”.
 - d) “Unit pengawasan internal berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama atau Direktur terkait, dan memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit”.
4. “Komunikasi”
- a) “Direksi wajib memastikan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan melalui Sekretaris Perusahaan”.
 - b) “Perusahaan tertentu wajib memiliki Sekretaris Perusahaan yang juga berfungsi dalam hubungan investor (*investor relations*)”.
 - c) “Jika tidak terdapat unit kepatuhan tersendiri, fungsi kepatuhan dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris”.
5. “Tanggung Jawab Sosial”
- a) “Direksi harus memastikan keberlanjutan usaha dengan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan”.
 - b) “Direksi juga perlu menyusun perencanaan tertulis yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut”.

Menurut Nasfi (2022) “*GCG* Aspek *EPS* baik dari segi kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan *Earnings Per Share* , menyangkut praktek pengelolaan perusahaan (*Good Corporate Governance*) atau sering disingkat *GCG*, dalam pengelolaan perusahaan yang amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan aspek-aspek keuangan maupun sosial. Secara teoritis, pelaksanaan *GCG* dapat meningkatkan kinerja keuangan”. “Tugas untuk direksi pada suatu unit usaha ialah memilih konsep yang akan dipilih baik jangka pendek juga jangka Panjang. Peningkatan berukuran dewan direksi

akan menaruh manfaat bagi perusahaan lantaran terciptanya sambungan dengan pihak luar perusahaan & mengklaim ketersediaan sumber daya. Salah satu tujuan perusahaan merupakan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Semakin baik & konsisten penerapan *GCG* maka perusahaan akan semakin gampang menerima tujuannya yaitu keuntungan” (Debbiyanto & Bawono, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Debbiyanto & Bawono (2021) dan Nugrahani & Dewi (2022), menyatakan bahwa “Dewan direksi berpengaruh terhadap *Earnings Per Share*”. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nasfi (2022) “Jumlah Dewan Direksi berpengaruh signifikan dengan *EPS* juga tidak dapat diterima”. Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

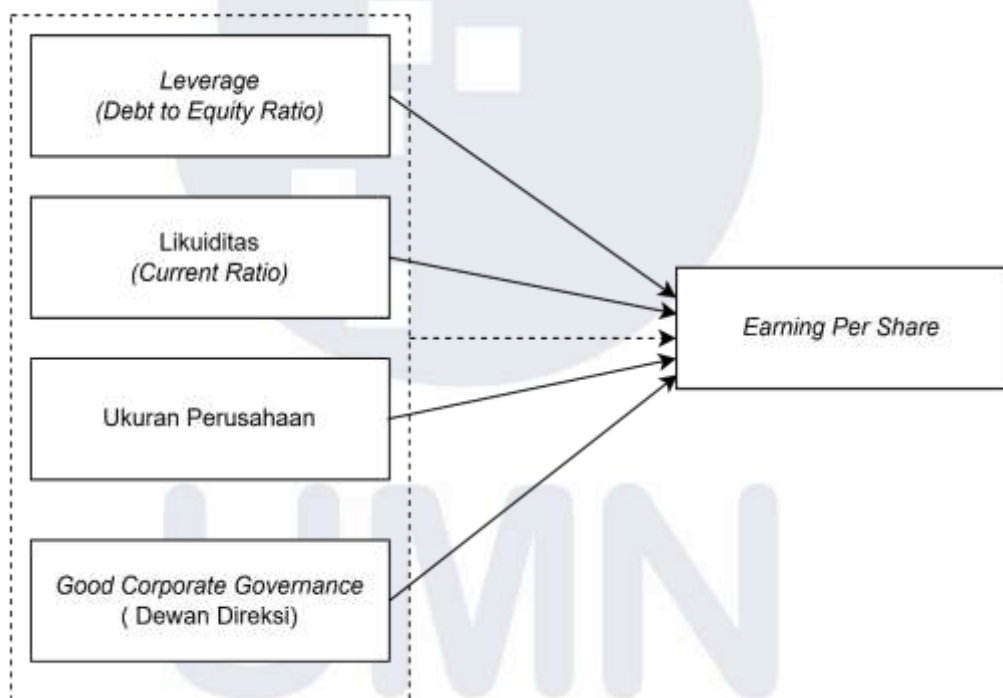
Ha4: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Earnings Per Share* .

2.8 Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* terhadap *Earnings Per Share*

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh *Leverage*, likuiditas, Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* (*GCG*) Terhadap *Earnings Per Share* (*EPS*). Hasil penelitiann tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2022), “secara simultan, variabel *Current Ratio*, *Total Asset Turnover*, *Debt to Asset Ratio*, *Debt to equity ratio*, *Return on Asset*, dan *Debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad et al. (2023), “Berdasarkan kriteria pengujian, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen yang terdiri dari *Current Ratio* (X1), *Total Asset Turn Over* (X2), *Debt to equity ratio* (X3), *Debt to equity ratio* (X4), dan Ukuran Perusahaan (X5) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *Earnings Per Share* (Y)”. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Debbiyanto & Bawono (2021) “Hal tadi bisa diartikan bahwa variabel *audit report*, *audit firm*, *Current Ratio*, komisaris, direksi, komisaris independent ,

komite audit & kepemilikan institusional dengan simultan mensugesti variabel *Earnings Per Share* & dikatakan model *goodness of fit*".

2.9 Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian